

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmadi, Abu. dan Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amos, H.F. Abraham. *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis Dan Empirisme*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asnawi (al), Muhammad Saïd. *al syari'ah al-islāmiyah wa al qanūn al-mishri*, alih bahasa: Saiful Ibad: *Problematika Dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-Undang*. Jakarta: Gaung Persada, 2005.
- Assegaf, Rifqi. dan Josi Khatarina. *Membuka Ketertutupan Peradilan*. Jakarta: Leilp, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- De Cruz, Peter. *Perbandingan Sistem Hukum Coomon Law, Civil Law dan Socialist Law*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- G. Kartasapoetra, Rien. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Jakarta: Bina Aksara, Cet.I, 1988.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-hikmah, 1994.
- Ma'arif, M. Syamsul. "Kedudukan Dissenting Opinion Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Pidana menurut UU No. 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6) tentang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam", Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.

- Manan, Bagir. *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*. varia peradilan No. 253 tahun ke XXI, 2006.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: yayasan al-hikmah, 2000.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II edisi revisi, (Jakarta: Reedbox Publisher diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal S.Hi., MA, 2010.
- MD, Mahfud. *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Mushtofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rasyid, A. Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, cet. 6, 1991.
- Rambe, Ropaum. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rasyid, Raihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Sabky (al), Maḥmūd bin Muhammad bin Khattāb, *Sunan Abī Daūd*. Beirut: Dār al-fikr, tt.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Setiardi, Gunawan. *Refleksi Hukum dalam Dinamika Masyarakat*. Semarang: Unika Soegi Pranata, 2005.
- Syaifuddin, Muhammad. *et.al, Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

- Suprayogo, Imam. dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Zamzami, Muchtar. *Dissenting Opinion dalam Praktek Pengadilan Agama*. vol. III April, 2006.
- Artikel. *Sumatera Ekspres*. 10 maret, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Jakarta: Sari Agung, 2002.
- Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: 2014.
- Handono, Adi. "Dissenting opinion", dalam <http://www.Scribd.Com/doc/58277350/> diakses pada 18 Oktober 2012.
- IKAHI, *Varia Peradilan*, Tahun ke XXI No. 253.
- Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia II, *Hukum Perdata dan Acara Perdata*, Proyek yurisprudensi MA, 1997.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- UU No 48 Tahun 2009 jo UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU No 50 Tahun 2009 jo UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.